BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Otonomi daerah sejak bergulirnya era reformasi mempunyai dampak yang sangat kompleks di dalamnya, salah satunya muncul fenomena pemekaran wilayah yang marak terjadi setelah otonomi daerah di gulirkan lebih tepatnya pasca berakhirnya era orde baru yang di harapkan bisa muncul sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan hingga percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dengan mendekatkan pelayanan pada masyarakat, yang menjadikan negara melalui pemerintah dalam hal ini di harapkan kehadirannya bisa dirasakan oleh masyarakat melalui otonomi daerah. Fenomena pemekaran wilayah di Indonesia menjadi marak sejak keluarnya Undang-undang No 22/1999 yang kemudian di amandemen menjadi Undang-undang No 32/2004. Rencana Pemekaran wilayah Kabupaten Sumenep menjadi salah satu penelitian tentang pemekaran daerah/wilayah.

A. Ide Dasar Pemekaran Wilayah Baru Kabupaten Sumenep

Ide dasar pemekaran wilayah di Kabupaten Sumenep bermula dari gerakan Mahasiswa Kepulauan Kangean yang tersebar di berbagai kota, Surabaya, Malang, Jogja, Jember, dll. Pada pertemuan di Malang akhirnya terbentuklah kepanitian yang kemudian disepakati dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepulauan Sumenep (PPK2S). PPK2S berdiri pada tanggal, 31 Oktober 2015 di Malang. Dengan latar belakang isu dan kondisi politik Madura Provensi. Hal itu mengharuskan mahasiswa turut andil dalam mewarnai kondisi yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendirian PPK2S dimotori oleh pemuda dan mahasiswa Kangean dari berbagai daerah. Mulai dari Malang, Surabaya, Jombang, Madura, dan lain-lain. Pada saat itu Ahmad Hosaini terpilih sebagai Ketua Umum PPK2S, Araful Firoq sebagai Sekjen, dan sekretaris dipasrahkan kepada Muzanni. *Grand issue* yang dibangun oleh anggota PPK2S yang berbentuk pernyataan ini perlu diapresiasi, dicermati, dianalisa dan diinterpretasikan dengan baik. Maksud dari makna Kepulauan di sini adalah semua Kepulauan yang ada di Kabupaten Sumenep. Kepulauan tersebut diantaranya adalah Kepulaun Kangean (Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan dan Kecamatan Sapeken), Kepulauan Sepudi (Kecamatan Gayam dan Kecamatan Nonggunung), Pulau Raas, Pulau Masalembu, Pulau Giligenting, Pulau Talango dll. Kepulauan Sumenep ada sekitar sembilan Kecamatan.Dengan sembilan Kecamatan yang ada di Kepulauan Sumenep tidak mungkin semuanya harus bergabung dengan Kabupaten Kepulauan yang digagas. Hal tersebut dikarenakan di antara Kepulauan yang ada secara geografis lebih dekat dengan Sumenep daratan, kecuali beberapa kepulauan yang letaknya cukup jauh dengan daratan. Di antaranya adalah Kepulauan Kangean, Raas, Sepudi dan Masalembu. Kajian yang dilakukan oleh PPK2S tentang kelayakan Kepulauan menjadi Kabupaten adalah pulau-pulau yang dipandang cukup jauh dengan daratan Sumenep tersebut. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk merangkul semua kepulauan yang ada di Kabupaten Sumenep. Sebagaimana yang di sampaikan oleh ketua PPK2S, Ahmad Hosaini.

> *Tidak menutup kemungkinan dalam perkembangannya nanti semua kepuluan dapat bergabung atau malah dari beberapa Kepulauan yang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

letaknya cukup jauh tersebut bisa berkurang menjadi beberapa Kepulauan saja. Kita tunggu perkembangan selanjutnya.[1]

Keinginan untuk menjadikan Kepulauan sebagai kabupaten berangkat dari diskusi kecil-kecilan yang dilakukan oleh teman-teman pemuda dan mahasiswa. Diskusi itu berkembang tatkala isu Madura menjadi Provinsi sendiri semakin santer terdengar di telinga dan media dan bahkan sudah menjadi isu nasional. Pelopor dari Madura Provinsi adalah mereka para aktifis Madura yang tergabung dalam wadah Panitia Persiapan Pembangunan Provinsi Madura (P4M). Para kompenen masyarakat Madura baik dari kalangan para tokoh, pemuda, mahasiswa dan masyarakat sepakat Madura menjadi provensi asalkan harus memenuhi syarat yang ada dalam UU no 23 tahun 2014. Dalam Undang-undang tersebut ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat teknis, fisik kewilayahan, dan administratif. Syarat teknis Madura sudah layak jadi provinsi. Namun secara fisik kewilayahan tinggal satu Kabupaten/kota lagi Madura jadi provinsi. Sementara syarat secara administratif mudah dilalui manakala syarat teknis dan fisik kewilayahan sudah terpenuhi karena respon dari kalangan politisi dan pemerintah cukup baik dan positif.

Menanggapi kekurangan dalam syarat fisik kewilayahan yang hanya tinggal satu Kabupaten/kota untuk Madura Provoinsi ada beberapa tawaran dan kemungkinan dari empat Kabupaten di Madura yang harus dimekarkan yaitu Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. Akan tetapi, dari tiga Kabupaten ini Sumenep mempunyai peluang besar untuk dimekarkan. Hal ini karena Sumenep termasuk Kabupaten yang paling banyak mempunyai Kecamatan, terdiri juga dari

[1] Wawancara dengan Ahmad hosaini, ketua PPK2S (03-11-2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daratan dan Kepulauan, dan Sumber Daya Alam (SDA) nya cukup menjanjikan dari pada kabupaten yang lain. Sementara dari Sumenep yang paling layak dan besar harapan dimekarkan adalah wilayah kepulauan. Hal tersebut dikarenakan wilayah kepulauan merupakan lumbung kekayaan Sumenep dan secara geografis tidak menguntungkan.

Kabupaten Kepulauan sebenarnya bukanlah isu yang baru muncul setelah Madura berkeinginan untuk menjadi provinsi. Isu ini sudah dibangun semenjak tahun sembilan puluhan dan bahkan pada tahun 2000 proposal peng-Kabupatenan sudah dibuat dan masuk meja kemendagri. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua PPK2S, Ahmad Hosaini.

> *Keinginan untuk menjadikan kepulauan sebagai kabupaten bukan baru muncul saat ini. keinginan itu sudah mulai ada sejak tahun 90-an bahkan pada tahun tersebut sekitar tahun 2000 sudah entry proposal ke pemerintah, tapi itu tdk berjalan dengan mulus, saya tidak tahu kendala apa yg dihadapi pada waktu itu. wacana pengkabupaten terus bergulir sampai saya menjadi mahasiswa. Pada tahun 2009 sewaktu saya menjadi ketua Ikatan Mahasiswa Kepulauan (IMAKA) Malang sebenarnya fokus program dan gerakan kita pada waktu itu adalah menjadikan kepulauan sebagai kabupaten tapi porsinya lebih banyak bersifat teoritas. kemudian keinginan itu datang lagi sewaktu wacana Madura ingin jadi Provensi. Pada awalnya kita menginginkan kepulauan kabupaten menjadi solusi yang solutif dalam menjadi Madura sebagai Provinsi karena dalam Undang-Undang pemekaran Madura belum cukup syarat secara fisik kewilayahan tinggal 1 kabupaten/kota untuk provinsi. tapi melihat dari sejarah perjuangan kita ingin menjadikan kepulauan sebagai kabupaten, maka bukan semata-mata karena unt melengkapi syarat madura provinsi tp ini merupakan keinginan dan kepentingan kita menjadikan kepulauan lebih baik.*[2]

Keinginan menjadikan Kepulauan Kabupaten tidak terwujud pada waktu itu, tapi isu dan keinginan tersebut tidak pernah berhenti dan tetap berjalan sampai

[2] Wawancara dengan Ahmad hosaini, ketua PPK2S (03-11-2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat ini. Keinginan untuk menjadikan Kepulauan sebagai Kabupaten bukan semata-mata karena untuk memenuhi persyaratan Madura sebagai provinsi, tapi lebih karena kebutuhan untuk hidup lebih layak dan lebih baik dari saat ini. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat kepulauan yang ada di Surabaya, Fawita.

> *Semangat warga Kepulauan Kangean sudah senada mendesak untuk menjadi daerah otonom, sebagai solusi atas berbagai permasalahan yg tengah berlangsung di tengah-tengah masyarakat, sehingga tercapai keinginan masyarakat untuk hidup lebih layak.*[3]

Lebih lanjut, aktifis salah satu organisasi terbesar di Indonesia ini, yang juga alumnus Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya ini:

> *Ketimpangan yang terjadi di Kepulauan Kangean di karenakan akses yang yang tidak memadai terhadap sumber perekonomian. Ini terjadi karena pembangunan tidak merata karena disebabkan jarak yang cukup jauh. Sehingga selayaknya Kepulauan Kangean menjadi Kabupaten.*

Persoalan Madura provinsi telah menjadi energi baru bagi panitia dalam mempersiapkan dan mempercepat realisasi Kabupaten Kepulauan. PPK2S siap membangun sinergi dan menetapkan langkah serta strategi bersama P4M dalam rangka percepatan peng-Kabupaten Kepulauan dan segera mewujudkan Madura sebagai provinsi. Langkah-langkah strategis bersama P4M nanti tentunya akan menjadi harapan dan kebutuhan kita bersama.

Beda halnya dengan salah satu aktifis Malang Corruption Watch (MCW) asal kepulauan, Umar Said, yang tidak terlalu setuju dengan ide pemekaran sebagaimana yang di gagas oleh PPK2S. Menurutnya, upaya memisahan dari Kabupaten Sumenep terkesan emosional tanpa dikaji lebih dalam.

---

[3] Wawancara dengan Fawita (10-11-2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *Wacana Kabupaten Kepulauan Sumenep terkesan emosional tidak melalui pertimbangan yang cukup dalam. Padahal menjadikan kabupaten baru itu harus melalu pertimbangan dan kajian yang komprehensif tersrtuktur. Tidak terburu-buru. Saat ini, yang terjadi penting pisah. Soal nanti persiapannya sambil berjalan. Kalau ini yang terjadi, maka sepertinya ngajak nguyon.*

Lebih lanjut mantan aktifis mahasiswa yang sekarang menjadi pegawai disalah satu Perusahaan Swasta di Surabaya ini menyampaikan bahwa tuntutan pemisahaan ini tidak terlalu kuat dalam artian tidak begitu jelas tuntutannya.

> *Yang menjadi tututannya kan tidak jelas, misalnya, salah satu tuntutannya karena kapal tidak layak, lampu tidak 24 jam, dan masyarakat belum sejahtera. Masayarkat belum sejahtera itu indikatornya apa? Kan tidak jelas. Tau tidak sejahtera dari mana? La wong masih belum ada kajian tentang itu. Ini hanya berdasar spekulasi yang tidak berdasar.* [4]

Hal senada dengan yang di sampaikan Imam Hidayat, mantan aktifis dan sekarang bekerja sebagai Pegai Bank Jatim di Sumenep, yang alumnus FEB Universitas Airlangga, Surabaya asal Kalikatak Kec. Arjasa. Menurutnya, Memisahkan diri dari Kabupaten Indukn itu bukan sesuatu yang sederhana. Tapi harus melewati prosedur yang cukup panjang.

> *Pemisahan itu tidak sesederhanya yang dipikirkan oleh temen-temen PPK2S. Setidaknya sarat Administratif harus dipenuhi. Dan syarat administrasi ini sebenarnya yang agak sulit untuk dipenuhi. Mungkin bisa, tapi butuh waktu yang cukup panjang. Setidaknya butuh waktu 5 tahun itu paling cepat. Ini masih salah satu syarat, bagaimana dengan syarat-syarat yang lain.*

1. Faktor-faktor kepulauan ingin menbentuk kabupaten

Terdapat beberapa faktor yang mendasari aspirasi dari masyarakat Kepulauan Sumenep untuk membentuk Kabupaten Kepulauan secara

[4] Wawancara dengan Umar Said (10-12-2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mandiri di antaranya: *Pertama*, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang masih belum optimal. *Kedua*, jauhnya rentang kendali jarak antara Kepulauan Kangean ke pusat Kabupaten Sumenep yang mana berjarak 160 mil atau 257,49 km dan hingga saat ini hanya bisa ditempuh hanya dengan jalur laut yaitu kapal, dengan kurun waktu selama lima hingga dua belas bahkan tiga belas jam, bergantung jenis kapalnya. *Ketiga*, kurangnya perhatian pemerintah terhadap penyediaan infrastruktur seperti; jalan, angkutan kapal, listrik, dan fasilitas umum lainnya.

Berdasarkan tiga poin yang dilansir oleh tim reset sebagaimana tersebut di atas, menjadi spirit dan ekspresi gugatan oleh sejumlah pemuda dan masyarakat kepulauan Sumenep, dengan cara membentuk sebuah wadah perjuangan bersama dengan nama Panitia Pembentukan Kepulauan Kabupaten Sumenep (PPK2S), tentu dengan satu frame tujuan yaitu mempercepat terbentukknya Kabupaten Kepulauan Sumenep. Melaui kepenitian tersebut, pemuda, mahasiswa dan masyarakat kepulauan Sumenep mempunyai peran masing-masing sesuai bidang dan kapasitas mereka guna tercapainya mimpi besar bersama, yaitu sebuah kemerdekaan dari sang penguasa, yang terletak di daratan Sumenep dan jauh dari jangkauan masyarakat Kepulauan. Hal ini, tentu menjadi keluh-kesah bersama seluruh elemen masyarakat Kepulauan Sumenep dan dampaknya sistemik, kecuali pilihannya adalah Kangean harus merdeka. Seperti yang disampaikan oleh Rahmi Zakiyah salah satu peserta deklarasi Kabupaten Kepulauan Sumenep yang digelar pada 08 Mei 2016 yang lalu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *Kabupaten Kepulauan Sumenep menjadi sebuah keharusan yang harus diperjuangkan oleh warga masyarakat Kepulauan, khususnya bagi kami sebgai mahasiswa. Bagi kami, kabupaten adalah harga mati. Kita harus merdeka dari segal bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Semenep sebagai pusat pemerintahan saat ini. Dengan menjadikan Kabupatyen Kepulauan, maka rakyat akan lebih sejahtera. Ketika upaya kita dihalang-halangin oleh pemerintah, maka kami akan melawan.*[5]

Peserta deklarasi Kabupaten Kepulauan Sumenep ini lebih lanjut menyampaikan bahwa perjuangannya tidak sendiri. Perjuangannya juga bukan tanpa dasar. Tapi melalui kajian yang cukup dalam.

> *Kami sebagai generasi muda bertanggung jawab dengan terlaksananya Kabupaten Kepulauan. Hal ini sudah didukung oleh masyarakat umum, juga tokoh masyarakat kita. Dan kami sebagai insan akademik, maka setiap aktifitas harus didasari oleh kajian Ilmiah, termasuk Kabupaten Kepulauan ini. Kami telah melakukan kajian yang cukup panjang. Saat ini, kami harus bergerak.*[6]

Sebagai mana yang di sampaikan oleh saudari Rahmi Zakiyah, bahwa langkah-langnya dalam hal ini sudah didahului dengan pengkajian yang cukup dalam.

Hal senada dengan apa yang sampaikan Rahmi Zakiyah, Iskil Firdaus mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, juga menyampaikan bahwa PPK2S harus melakukan penelitian lebih dalam sebelum beraksi dilapangan.

> *Saya kira, mahasiswa sebelum beraksi kelapangan harus melakukan kajian yang komprehensif terhadap tuntutan Kabupaten Kepulauan Sumenep, supaya tidak salah langka yang mengakibatkan terjadinya kefatalan terhadap rencana kita menjadikan Kabupaten Kepulauan. Kabar baiknya, bahwa rencana Pemisahan Kabupaten Kepulauan ini sudah di kaji oleh tim yang sengaja dibentuk sebagai devisi dari PPK2S.*

---

[5] Wawancara dengan Rahmi Zakiyah (13-11-2016)
[6] Ibid (13-11-2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tapi lain halnya yang disampaikan oleh Umar said yang tidak setuju, karena banyak para tokoh-tokoh kepuluan yang menduduki jabatan di Kabupaten Sumenep sudah melupakan kepuluan dan tidak menepati janjinya, sebagai yang dikatakan olehnya;

> *Menurut saya belum, karena masih banyak pr yang harus perbaiki, mulai dari kepentingan pribadinya atau kelompok, contohnya saja banyak para tokoh-tokoh yang manjadi wakil rakyat di kabupaten sumenep tidak ingat sekali kepada rakyak kepulauan. Jadi saya menyimpulkan bahwa kepentingan ini hanya untuk pribadi dan sekelompok orang.*

Untuk mempermudah dalam mengkaji dan memotrek kelayakan kepulauan Sumenep menjadi kabupaten, panitia tim reset tengah memetakan dari beberapa aspek, di antaranya aspek psikologis, fisik, tehnis dan administratif. Untuk aspek psikologis adalah hal yang mendasari dari internal masyarakat Kepulauan kenapa harus menjadi kabupaten, untuk aspek fisik, tehnis dan administratif adalah prasyarat untuk terpenuhinya secara legal formal suatu daerah yang ingin mandiri dan mekar. Aspek-aspek tersebut, secara lebih rinci dapat dilihat pada penjabaran berikut:

a. Aspek Psikis

   Kebijakan tentang otonomi daerah tengah dicanangkan sejak 2004 dan ditetapkan pada tahun 2007, tetapi efek kebijakan tersebut belum dirasakan oleh masyarakat Kepulauan Sumenep. Secara psikis, masyarakat Kepulauan Kangean tengah mengalami tekanan batin dan perang mental, melihat kondisi ketimpangan antara masyarakat kepulauan dengan masyarakat daratan Kepulauan Sumenep yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertinggal jauh dan lambat. Sebut saja sebagai contoh misalnya, hanya ingin mengurus administrasi KTP, masyarakat Kangean harus menunggu paling cepat satu bulan hingga enam bulan baru mereka mendapatkan haknya sebagai warga Negara, itupun kalau tidak dikenai biaya administrasi tambahan dari sekretaris desa. Contoh lain, fasilitas kapal ke Kangean hanya tiga kali dalam seminggu kalau cuaca normal dan bisa sampai satu bulan sekali kalau cuaca memburuk, biasanya pada bulan Agustus-Desember. Belum lagi fasilitas listrik yang menyala saat malam hari, dari jam 18.00-04.30 WIB (hanya 10 jam menyala dalam sehari), jadwal ini belum dikurangi jadwal giliran menyala, artinya aliran listrik tidak menentu tiap malamnya dan masyarakat kepulauan Kangean harus siap-siap bergelap-gelapan ketika tiba-tiba listrik padam di malam hari dan sebagai pertanda kalau sebentar lagi akan ada jadwal giliran listrik padam antar desa. Hal yang disebutkan barusan hanya sebagian contoh dari potret ketimpangan antara masyarkat Kepulauan dengan masyarakat daratan.Padahal kita semua tahu bahwa SDA kepulauan Kangean sebagai pusat eksploitasi migas, sebagai sumber APBD terbesar Sumenep. Menurut Mnuhammad Sukri, anggota DPR Sumenep, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah yang diatas, menyampaikan:

> *Sebagai solusi atas berbagai permasalahan yg tengah berlangsung di tengah-tengah masyarakat kepulauan Sumenep yang potensi wilayah, jumlah penduduk dan berbagai kebutuhan warga semakin ke sini yg harus semakin cepat, hal itu tidak mungkin kalau yg menangani Sumenep. Maka harus memisahkan diri dari Kabupaten Sumenep. Menjadi Kabupaten sendiri.*[7]

[7] Wawancara dengan Hodril S Anam (16-11-2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai keluh kesah tersebut, sehingga tidak heran ketika secara batin mereka ingin keluar dari Kepulauan dan memperoleh kehidupan yang lebih layak agar mampu bersaing dengan masyarakat umum. Kita selaku warga Kepulauan Kangean, ketika jalan-jalan ke beberapa daerah bahkan ke luar negeri, tidak perluheran ketika tiba-tiba terdapat orang berpengaruh di daerah tersebut yang berasal dari kepulauan Kangean, seperti di Kalimantan, Bali, Sumatera dan daerah lain, begitu juga di luar negeri seperti Malaysia, Saudi Arabia, Brunai dan di benua lain seperti UK bahwa terdapat orang Kangean yang memiliki pengaruh besar di daerah atau Negara tersebut. Secara logika umum kekinian, terasa tidak mengkin memang orang Kepulauan Kangean bisa tersebar sejauh itu dan memiliki peran-peran penting dan berpengaruh tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa orang kepulauan Kangen memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan mampu bersaing dengan berbagai lapisan masyarakat di muka bumi.

b. Aspek Kewilayahan

Aspek fisik kewilayahan menjadi salah satu prasyarat yang wajib dipenuhi oleh setiap daerah otonom yang ingin mekar[8]. Untuk Kepulauan Sumenep secara kewilayahan sudah memenuhi, mengingat luas wilayah kabupaten kepulauan Sumenep yaitu 815,94 km^2 yang terdiri dari 108 pulau, di mana 39 pulau berpenghuni dan 69 pulau tidak berpenghuni.

[8]UU No.32 tahun 2004 dan PP No.78 tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebupaten Kepulauan terletak pada daerah terpencil dan terdiri dari gugusan pulau kecil-kecil dan masih alami serta masih banyak pulau yang belum berpenghuni.Terletak pada koordinat $5^0$4’39”LU $114^0$36’5”BT / 5,0775LS 114,60139^{0}BT. Dengan batas-batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan laut Kalimantan Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan selat Bali, sebelah barat berbatasan dengan pulau Madura dan sebelah timur berbatasan dengan laut Flores.Prospek secara fisik kepulauan Sumenep menjadi Kabupaten dimungkinkan nantinya akan terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu; Kecamatan Nonggunung, Gayam, Raas, Kangayan, Sapeken dan Arjasa. Pemetaan tersebut berdasarkan pertimbangan geografis Kepulauan Sumenep dan mengacu pada PP no.78/2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah otonom.

c. Teknis

Terkait syarat teknis juga menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi agar perencanaan pemekaran daerah dapat diproses, kembali mengacu pada PP RI no. 78/2007, dimana disebutkan bahwa untuk memekarkan suatu daerah terdapat 11 varian yang harus dikaji kelayakannya yang meliputi; (1) kependudukan, (2) kemampuan ekonomi, (3) potensi daerah, (4) kemampuan keuangan, (5) sosial budaya, (6) sosial politik, (7) luas daerah, (8) pertahanan, (9) keamanan, (10) tingkat kesejahteraan masyarakat, dan (11) rentang kendali. Keseluruhan varian tersebut, nantinya akan dilakukan pembobotan dengan hasil bobot menimal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dicapai agar layak menjadi kabupaten adalah 340 poin, sesuai dengan standart pada PP no.78/2007.

1) Jumlah penduduk Calon Kabupaten Kepulauan 108% dari lima kali rata-rata jumlah penduduk Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep dengan kepadatan 232% dari rata-rata pembanding yaitu Kab. Kepulauan Talaud, Kab Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Anambas, Sulawesi.
2) PDRB non migas perkapita Calon Kabupaten Kepulauan tahun 2014 ialah 87% dari rata-rata PDRB non migas perkapita pembanding yaitu Kab. Kepulauan Talaud, Kab. Kepulauan Sangihe, dan Kab. Kepulauan Anambas. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ialah 95% dan Kontribusi PDRB non migas Kepulauan Kangean terhadap Kabupaten Sumenep ialah 19%.
3) Potensi daerah jika dibandingkan dengan Kepulauan pembanding yang sejenis
    a) Rasio Bank dan Lembaga Keuangan calon Kabupaten Kepulauan ialah 40.16%
    b) Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk calon Kabupaten Kepulauan ialah 89%
    c) Rasio pasar per 10.000 penduduk calon Kabupaten Kepulauan ialah 48%
    d) Perbandingan Rasio Sekolah SD per Penduduk Usia SD (7-12th) calon Kab. Kepulauan ialah 83%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Perbandingan Rasio SMP per penduduk usia SMP (13-15th) calon Kab. Kepulauan ialah 63%

f) Rasio Bank dan Lembaga Keuangan calon Kabupaten Kepulauan ialah 40.16%

g) Perbandingan Rasio SMA per penduduk usia SMA (16-18th) calon Kab. Kepulauan ialah 58%

h) Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk calon Kabupaten Kepulauan ialah 82%

i) Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk calon Kabupaten Kepulauan ialah 15%

j) Perbandingan persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor/Perahu/Perahu Motor/Kapal Motor di calon Kabupaten Kepulauan ialah 41%

k) Perbandingan persentase Pelanggan Listrik terhadap Jumlah Rumah Tangga calon Kabupaten Kepulauan ialah 104%

l) Perbandingan Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor calon Kabupaten Kepulauan ialah 0.10%

m) Perbandingan Persentase Pekerja yang Berpendidikan minimal SMA terhadap Penduduk Usia 18 Tahun ke Atas calon Kabupaten Kepulaun ialah 53%

n) Perbandingan Persentase Pekerja yang Berpendidikan minimal S-1 terhadap Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas calon Kabupaten Kepulaun ialah 29%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

o) Perbandingan Rasio PNS per 10.000 penduduk calon Kabupaten Kepulauan ialah 25% .

4) Kemampuan keuangan jika dibandingkan dengan Kabupaten pembanding yang sejenis.

a) Total pendapatan daerah sendiri calon Kabupaten Kepulauan dengan Kabupaten Kepulauan pembanding yang sejenis ialah 85%

b) Perbandingan rasio Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) terhadap jumlah penduduk calon Kabupaten Kepulauan dengan Kabupaten Kepulauan pembanding yang sejenis ialah 34%

c) Perbandingan rasio Pendapatan Daerah Sendiri terhadap PDRB non migas calon Kabupaten Kepulauan dengan Kabupaten Kepulauan pembanding yang sejenis ialah 46%.

5) Sosial budaya jika dibandingkan dengan kabupaten pembanding yang sejenis

a) Perbandingan rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk calon Kabupaten Kepulauan dengan Kabupaten Kepulauan sejenis ialah 170%

b) Perbandingan rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk calon Kabupaten Kepulauan ialah 92%

c) Perbandingan jumlah balai pertemuan calon Kabupaten Kepulauan ialah 58%,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Perbandingan jumlah organisasi kemasyarakatan calon Kabupaten Kepulauan dengan Kabupaten Kepulauan sejenis ialah 250%

6) Luas wilayah Budaya jika dibndingkan dengan Kabupaten pembanding yang sejenis

a) Luas wilayah keseluruhan calon Kabupaten Kepulauan ialah 95%

b) Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan calon Kabupaten Kepulauan ialah 66%

7) Rasio jumlah aparat keamanan terhadap jumlah penduduk di calon Kabupaten Kepulauan ialah 10% dari rata-rata Kabupaten Kepulauan pembanding yang sejenis.

8) Pertahanan

a) Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah 12%

b) Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan ialah sangat aman, karena tidak berbatasan dengan negara lain

9) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan ialah 99% dari rata-rata IPM Kabupaten Kepulauan pembanding yang sejenis

2. Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

Kepulauan Kangean, Ra'as, dan Sapudi saat ini mulai berkembang mulai dari Sumber Daya Alam (SDM). Adapun Potensi Sumber Daya Alam Kepulauan Kangean.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perkebunan dan Pertanian

Lahan di Kepulauan Kangean terdiri atas lahan sawah dan lahan kering. Lahan kering memiliki luas 37,501.10 Ha (81.35%) tersebar di 28 Desa, sedangkan sisanya adalah tanah sawah seluas 8,594.90 Ha(18.65%) tersebar di 25 desa.

a. Lahan Sawah

Penggunaan lahan sawah di Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean) tidak ada yang beririgasi teknis, bahkan sebagian besar 8,332 Ha atau 96.9% dari seluruh lahan sawah yang ada merupakan lahan tadah hujan. Sisanya 22 Ha atau 2.84% merupakan lahan sawah beririgasi sederhana dan 22 Ha atau 0.26% beririgasi semi teknis. Potensi pertanian di Kepulauan Kangean masih kurang dapat diandalkan sebagai sumber utama penduduknya dikarenakan oleh kondisi tanah yang banyak berbatu dan sebagai pulau kecil tentu kurang mampu menampung air hujan.

b. Lahan Kering

Dari lahan kering yang ada (37.499 Ha), sebagian besar (16.488 Ha) atau sekitar 43.97% dari seluruh lahan kering yang ada merupakan lahan yang tidak diusahakan. Setelah itu ada seluas 19, 864 Ha atau sekitar 52.97% dari seluruh lahan kering di Pulau Kangean digunakan untuk tegal dan kebun. Wilayah Kepulauan Kangean lebih cocok untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditanami dengan tanaman jagung dan tanaman palawija yang lain seperti kacang hijau, kacang tanah maupun ubi jalar.

2. Perikanan

Perikanan merupakan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di Pulau Kangean. Budidaya ikan dilakukan didarat dengan luas 48 Ha untuk tambak dan 54 Ha untuk budidaya air tawar. Pembuatan tambak yang dilakukan memiliki dampak karena dilakukan penebangan atau konversi hutan mangrove dikarenakan perbedaan amgka yang signifikan antara produktivitas tambak dengan budidaya ikan air tawar.

3. Hutan

Hutan jati yang terdapat di wilayah Kepulauan Kangean merupakan hutan alam dan hutan tanaman. Keberadaan hutan jati awalnya merupakan hutan alami, namun sekarang hampir keseluruhan hutan jati yang ada dikelola oleh Perum Perhutani Unit 1 (KPH) Madura. Hutan jati merupakan hutan tanaman yang berada pada daerah dataran rendah, disamping hutan mangrove yang tersebar pada sepanjang pantai yang landai. Jenis pohon dalam hutan yang terdapat di Kepulauan Kangean antara lain jati dan mahoni. Selain hutan jati yang merupakan hutan tanaman, terdapat hutan dataran rendah (dengan jenis vegetasi termasuk hutan rimba campuran) yang sebagian besar terletak didaerah pegunungan sehingga memiliki fungsi lindung yang sangat penting. Kondisi hutan alam yang masih dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi baik. Batas yang memisahkan hutan jati dengan hutan alam berupa daerah patahan.

4. Hutan Mangrove

Hutan mangrove yang ada di Kepulauan Kangean memiliki luas 6.408,08 hektar atau sekitar 83% dari luas hutan mangrove daerah Jawa Timur yang memiliki luas 7.750 hektar akan sangat penting artinya bila dikelola dengan baik, karena ekosistem hutan mangrove dapat memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung bagi pendapatan suatu daerah. Produk yang dihasilkan dari pengelolaan hutan mangrove berupa kayu sebagai bahan bangunan, kayu bakar, pupuk, obat-obatan, dan sebagai tempat pariwisata. Dari hasil perhitungan nilai ekonomi sesuai penggunaan atau pemanfaatan hutan mangrove tersebut nilai hutan mangrove sebagai pelindung abrasi yang paling tinggi. Pemanfaatan konversi hutan mangrove yang digunakan sebagai tambak ikan dan udang membuat dampak negatif jangka panjang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang didapat oleh karena dapat merusak dan menurunkan potensi hutan mangrove terutama dalam menunjang produktivitas hutan mangrove maupun jasa lainnya. Selain itu juga akan mengakibatkan rusaknya habitat alami dari ikan yang terdapat disekitar hutan mangrove, bahaya abrasi pantai dan hilangnya potensi wisata[9].

5. Gas PT kangean Energy Indonesia

[9] Maria Angelina Sutanto,dkk. Jurnal, *Perancangan promosi untuk menunjang potensi wisata bahari kepulauan kangean, kabupaten sumenep, jawa timur (P*rogram Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain,
Universitas Kristen Petra, Surabaya), hlm 11-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut catatan Harian Surya Indonesia (2007) Kangean Energy Indonesia di Pulau Pagerungan Besar memproduksi gas alam awalnya sebesar 175 MSCF (million standard cubic feet) per hari yang disalurkan melalui pipa bawah laut 28 inci sepanjang 450 KM menuju Porong (sebagai home base). Dari home base ini kebutuhan gas alam dipasok untuk memenuhi kebutuhan di Petrokimia, Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT PJB Unit Pembangkit Listrik. Pada tahun 2008 PT kangean Energy Indonesia yang perusahaan yang bergerak pada eksplorasi khusus gas alam tersebut. Adapun Kegiatan Community Development PT kangean Energy Indonesia meliputi berbagai bidang diantaranya: Pertama bidang sosial ekonomi yaitu mengadakan pelatihan tentang tata cara budi daya ikan, pelatihan menjaga lingkungan laut, pelatihan tata cara budi daya rumput laut , pelatihan dalam produksi VCO (virgin coconut oil), serta bagaimana promosi hasil-hasil laut. Kedua di bidang pendidikan yaitu dengan membangun dan memperbaiki sekolah dari tingkat dasar samapai menengah, memberikan batuan untuk peningkatan kesejahteraan Guru dan beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi , Program Regenerasi untuk Nelayan yang profesional. Ketiga dibidang Sosial atau fasilitas masyarakat; membuat lapangan bermain, karang taruna, sarana olahraga (sepak bola, bola volli, bulu tangkis dll), distribusi air tawar, renovasi masjid, pembangunan pesantren, peringatan hari-hari besar keagaman, serta pengiriman Da'i (juru dakwah) ke berbagai Daerah, Keempat dibidang kesehatan pembangunan dan renovasi Puskesmas, program gizi untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Balita, mendatangkan Dokter untuk Puskesmas, program penambahan fasilitas kesehatan, dan pengguanan air bersih, Kelima bidang lingkungan program menjaga keamanan dari konservasi laut yang berlebihan , penjagaan lingkungan laut dari pencemaran. (Sumber: http://www.kangean-energy.com) Menurut Ono Sutarno Kepala bagian HUMAS PT KEI dalam acara Silaturahmi dengan Himpunan Mahasiswa Se-Kecamatan Sapeken (HIMAS) pada tahun 2013 di Jakarta, dijelaskan beberapa hal mengenai mekanisme CSR. Pertama Desa Pagerungan Besar dan Sepanjang menjadi salah satu desa prioritas community development, Kedua usulan pengembangan masyarakat setiap tahun dibahas pada pertemuan komite pengembangan masyarakat dengan susunan sebagai berikut: CCD (Committee Community Development) diketuai Wakil Bupati Sumenep dengan anggota SKK MIGAS, Pemerintah Kabupaten, Camat, Kepala Desa, Perwakilan tokoh masyarakat dan perusahaan. Ketiga usulan Musbangdes-Musrenbangkec-komite penyusunan program-sesuai kemampuan perusahaan (atas persetujuan SKK MIGAS) dan Pemerintah Daerah dengan skala prioritas. Banyak hal yang suda kami lakukan untuk pemberdayaan masyarakat melalui CSR ini bahkan menurut Ono Sutarno dana CSR yng dikeluarkan oleh PT. KEI paling besar di Kabupaten Sumenep. Dana Pengembangan Masyarakat (community development) per tahun jumlahnya sangat besar mencapai Rp. 1.925.000.000 (satu milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2007 dan terus meningkat sampai sekarang. Selain itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan yang muncul keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan CSR Kurangnya pemahaman tentang wawasan lingkungan laut, dukungan dan political will dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap program tersebut. Faktor eksternal juga sangat mempengaruhi seperti ekspektasi masyarakat yang besar sehingga masyarakat selalu menuntut pembangunan infrastruktur kepada perusahaan[10].

Kepulauan Kangean dalam kondisi rusak. Hal ini diakibatkan oleh penggunaan bahan peledak dan racun dalam penangkapan ikan disekitar terumbu karang. Selain hal tersebut, kerusakan terumbu karang juga disebabkan oleh rusaknya hutan mangrove karena tidak adanya pengaturan aliran air tawar oleh hutan mangrove yang mengalir dari darat kelaut sehingga tingkat salinitas air menjadi tidak teratur dan mengakibatkan matinya beberapa terumbu karang.

Secara umum potensi sumber daya alam laut dan pantai di Kepulauan Kangean dan sekitarnya, berupa pulau-pulau yang ditumbuhi mangrove dan sebagian memiliki hamparan terumbu karang. Keindahan kumpulan terumbu karang tumbuh subur terletak disekitar Pulau Mamburit, Pulau Kangean, Pulau Saobi, Pulau Sabunten, Pulau Paliat, Pulau Sapangkur, Pulau Saur, Pulau Saibus, Pulau Sapeken, Pulau Sasiil dan Pulau Sepanjang. Sedangkan pulau-pulau kecil yang berada disekitar sebelah Tenggara Pulau Kangean, yang tidak memiliki daratan dan ditumbuhi

[10]http://www.kompasiana.com/jankar-abidin/membongkar-dana-besar-csr-pt-kangean-energy indonesia_54f3695e7455137c2b6c7542

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

vegetasi mangrove yang relatif masih utuh yaitu Pulau Bindera, Pulau Kaloangan, Pulau Malang, Pulau Malelang dan Pulau Bumnyarit.

3. Hambatan dalam pembentukan kabupaten kepulauan

Dukungan dan Hambatan dalam proses pemekaran Kabupaten Kepulauan Sumenep rencananya akan dijadikan sebagai daerah pemekaran, daerah ini akan dikembangkan berdasarkan potensi yang dimilikinya dan diperkirakan akan lebih maju dibandingkan daerah induknya. Diantaranya potensi-potensi yang akan digali dari Kabupaten Kabupaten Sumenep Kepulauan ini antara lain industri perikanan, perkebunan, pelabuhan baik nasional maupun internasional.

Polemik Pemekaran Kabupaten Kabupaten Kepulauan Sumenep, Dinamika pembentukan Kabupaten Kepulauan Sumenep, tidak terlepas dari beberapa kiprah elit lokal yang sangat mendukung pembentukan tersebut, jika dilihat dari sejarah pembentukan Kabupaten Kepulauan Sumenep, sebelum PPK2S menjadi wadah aspirasi untuk pemekaran Kabupaten Kepulauan Sumenep, maka Organisasi Mahasiswa Daerah adalah wadah yang sebelumnya dikatakan gagal, menjadi pertanyaan penulis terkait dengan hal ini. Pemekaran daerah merupakan dampak kontestasi elite lokal. Elite lokal yang kalah bersaing di pilkada, tidak mendapat kursi di DPRD, dan birokrasi biasanya mempelopori urusan pemekaran daerah. Daerah induk kadang menentang, namun tak jarang kabupaten induk mengalah (mendukung pemekaran) asalkan dirinya tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diganggu selama menjabat. Dalam beberapa kasus, ada juga karena kalangan intelektual kalah bersaing di kampus, maka mengusulkan pemekaran di daerah asalnya (Syafarudin). Maka dalam hal ini sesuai dengan salah satu variabel yaitu Politik Kontestasi Elit Lokal. Dari gambaran diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perebutan kekuasaan masih cenderung menjadi motif dasar pemekaran, kepentingan politik bisa saja menjadi alasan dasar untuk memikirkan percepatan, melihat dari sumber daya yang dimiliki, beberapa dari SDM pelaku pemekaran adalah pejabat-pejabat yang dulu pernah menjabat di pemerintahan maupun legislatif. Dukungan pemerintah yang responsif, menjadi kekuatan besar bagi PPK2S untuk mengawal proses pemekaran.

Potensi Elite Lokal, Ajang bagi pejabat publik, anggota DPRD, anggota DPR, DPD, dan Presiden mencari popularitas. Alasannya the power of elite itu saling berlomba-lomba mendengarkan dan mewujudkan aspirasi rakyat dengan harapan rakyat mengetahui peran mereka dipilih kembali. Dengan mewujudkan pembentukan daerah seolah-olah aspirasi masyarakat diwujudkan dan ini merupakan bagian dari pencitraan politik (Syafarudin).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Umar Said;

> *Peran yang dilakukan oleh para tokoh kepulauan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk untuk kebutuhan masyarakat kepulauan Sumenep, dan juga banyak para tokoh kepulauan belum ada kesepakatan siapa nantinya yang akan jadi bupati kalau memang kepulauan pisah dari Sumenep.*

Jadi, dorongan untuk memisahkan Kabupaten Kabupaten Kepulauan Sumenep dari Kabupaten Kabupaten Sumenep tidak hanya dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai komoditas politik semata dari segelintir orang-orang yang punya kepentingan. Jika memang keinginan itu serius dan murni dari warga Kabupaten Sumenep, akan lebih terbuka peluang jika ditempuh melalui jalurjalur resmi secara konstitusional tanpa perlu memanfaatkan momentum jelang pesta demokrasi. Dari pengamatan dan pandangan penulis dari beberapa elite yang mencari popularitas dalam hal pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Kepulauan Sumenep, pro kontra dalam berdemokrasi sangat di wajarkan, namun dengan adanya proses pemekaran Kabupaten Kepulauan Sumenep, masih banyak dijadikan sebagai ajang untuk mencari popularitas semata, hal ini dapat dilihat dari tokoh-tokoh pembentukan, hampir dari segian banyak adalah wajah-wajah lama yang tidak lagi menjadi legislatif. Jika dilihat dari struktur kepengurusan PPK2S setelah pemekaran nantinya disahkan dalam Undang-Undang akan ada beberapa contoh permasalahan yang mungkin saja terjadi, jika dibandingkan dengan beberapa daerah yang telah mekar, masalah yang sering terjadi adalah : 1. Konflik dengan kekerasan (Provinsi Irian Jaya Barat); 2. Menurunnya jumlah penduduk dan PAD Secara drastis (Kabupaten Aceh); 3.Menyempitnya luas wilayah dan beban daerah Induk (Halmahera Selatan); 4.Perebutan wilayah dan masalah ibukota pemekaran (Sulawesi Tengah); 5. Perebutan Aset (Kabupaten Bulungan). Pemekaran daerah merupakan ajang pejabat publik politisi, anggota DPRD, anggota DPR, DPD, dan Presiden mencari popularitas.Alasannya the power of elite itu saling berlomba-lomba mendengarkan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan aspirasi rakyat dengan harapan rakyat mengetahui peran mereka dipilih kembali. Dapat disimpulkan betapa menjadi tugas berat masyarakat Kabupaten Kepulauan Sumenep untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat melalui PPK2S, dengan melihat kepada proses yang ada, dimana kekuatan-kekuatan politik dan aspirasi politik dari masyarakat Kabupaten Sumenep untuk dimekarkan adalah hak setiap daerah, namun harus dipikirkan, kekuasaan yang telah diamanahkan rakyat nantinya harus berkiblat untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan, agar jika proses tersebut terjadi, Kabupaten Sumenep akan menjadi slah satu daerah yang sukses dalam tujuan percepatan pembangunan.

4. Pertimbangan Dalam Membentuk Kabupaten Kepulauan

Ada beberapa pertimbangan dalam membentuk Kabupaten kepulauan. Dan faktor-faktor itu masih berlanjut dikaji.

a. Faktor Politis,

Kecendrungan yang dipertimbangkan untuk pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Sumenep adalah terkait dengan pertimbangan pemerataan dan terlalu luasnya daerah Kabupaten Sumenep, namun kepentingan yang sangat penting haruslah dikaji lebih mendalam dan di anlisis secara kualitas, satu sisi diharapkan pemekaran Kabupaten Kepulauan Sumenep akan mampu menjalankan bagaimana roda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan kedepan, baik itu eksekutif maupun legislatif apakah eksekutif telah memadai, bagaimana situasi sarana dan prasaran pemerintahan yang akan dijadikan sebagai daerah otonom baru, indikasi lobi-lobi dikalangan elite sebagai suatu proses administrasi sebagai salah satu contoh yang dijadikan syarat yang sangat mendasar untuk melakukan pemekaran kepada dewan pertimbangan otonomi baru (DPOB), sehingga analisis kajian-kajian yang lain cendrung tidak dipertimbangkan secara kualitas, hanya mengandalkan angka-angka yang bersifat kuantitas atau tercapai atau tidak dicapai, dan hal ini lah yang menjadikan para elite untuk mencari popularitas

b. Faktor efektivitas dan efisiensi,

Esensi pemekaran adalah untuk memperpendek rentang kendali serta menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan kesejahteraan, konsentrasi pembangunan yang tidak merata sehingga masyarakat beranggapan pemerintah induk tidak mampu menjawab persoalan-persoalan rakyat secara konsisten, jauhnya jarak pelayanan publik kepada masyarakat dan kurangnya konsentrasi pembangunan yang tidak merata yang dilakukan oleh pemerintah induk harusnya dijadikan tantangan oleh pemerintah induk untuk dicarikan solusinya, dan diharapkan upaya-upaya bagi-bagi kekuasaan semestinya tidak menjadi alasan yang selama ini dijadikan kekuatan sebagai bentuk aspirasi rakyat

c. Faktor Aspirasi Masyarakat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aspirasi rakyat Kabupaten Kepulauan Sumenep bisa lebih terdengar, dimana keinginan pemekaran ini berasal dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat bersatu dalam mengawal pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Sumenep, selain itu pemerintah juga mengapresiasi keinginan pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Sumenep, hal ini berkaitan dengan terpenuhi aspirasi rakyat sebagai dasar pendidikan politik dan bebas mengeluarkan pendapat bagi setiap masyarakat untuk memajukan daerahnya. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa prospek pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Sumenep haruslah dilihat secara jelas, apakah penduduk cukup prospektif, bagimana persyaratan administrasi dapat terpenuhi serta kemampuan daerah nantinya dalam hal finansial, kelemahankelemahan SDM yang belum kuat harusnya dapat dikaji, agar kerawanan politik dan konflik elite tidak menjadikan rakyat sebagai objek saja.

B. Peran Elite Politik Dalam Proses Pemekaran Wilayah di Kabupaten Sumenep

Wacana pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom di Kabupaten Sumenep tidak terlepas dari prakarsa elite lokal. Langkah prakarsa ini tidak saja dilandasi oleh rasionalitas kesenjangan, tetapi juga didorong oleh masalah sentimen emosional ikatan kewilayahan dan subetnisitas. Hal ini dimanifestasikan pada beberapa bentuk anggapan ketidakadilan, misalnya yang paling menonjol terkait peluang yang dinilai kurang proporsional bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan potensi daerah dan akses layanan publik dalam arti luas. Sebahgaimana yang disampaikan oleh Ahmad Hosaini sebagai ketua PPK2S.

> *Ketidak adilan yang terjadi, tidak hanya soal pemerataan, tapi juga ketidak adilan yang bersifat luas yang melatar belakangi kami untuk bertindak. Kami akan bertindak melawan segala bentuk ketidak adilan yang terjadi secara massif dan terstruktur. Dalam hal ini, kita berharap bisa berkolaborasi dengan tokoh masyarakat yang ada di kepulauan Kangean mau pun yang sudah tinggal di daratan (kota), baik yang di Sumenep, hingga yang ada di Jakarta, dsb.* [11]

Dalam konteks pembentukan daerah otonom, elite memiliki peran sentral dalam upaya meloloskan usulan pembentukan daerah menjadi daerah otonom baru. Dan kehadiran elite dalam mengusulkan pembentukan daerah tidak dalam posisi tunggal selalu mengalami pergantian pada setiap aspeknya seperti Presiden, gubernur, walikota/bupati merupakan elite yang berada pada tataran eksekutif dalam hal ini pemerintah dan juga elite dalam bidang DPRD, DPR, DPD.

Perihal elite politik, salah satu mantan aktifis yang berasal dari Torjek Kec. Kangayan memiliki sudut pandang yang agak berbeda dengan kebanyakan mahasiswa yang tergabung dengan PPK2S. Menurutnya, Peran elite politik memang sangat dibutuhkan, baik sebagai support moral mau pun finansial. Akan tetapi sulit mengharapkan para elite untuk tidak memperjuangkan kepentingan pribadinya.

> *Saya agak skeptis dengan elite politik saat ini. Dan apa yang saya rasakan cukup beralasan. Mereka sulit untuk bisa berjuang dengan rakyat. Mereka pasti mengedepankan kepentingan pribadinya. Sebagai fakta yang bisa dihadirkan adalah para wakil rakyat yang berasal dari kepulauan saat ini suaaranya tidak terdengar. Mereka terjebak terhadap kepentingan politik praktis yang pragmatis. Sehingga hal demikian tidak*

[11] Wawancara dengan Ahmad Hosaini (03-11-2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa diharapkan bisa membatu gerakan yang sedang digagas, yakni pemisahan Kabupaten Kepulauan Sumenep.[12]

Keberadaan dan peran elite politik tidak bisa lepas dari pengaruh perubahan yang terjadi pada sistem politik yang melingkupinya. Perubahan yang terjadi pada sistem politik membawa pengaruh selain terhadap hubungan antara elite juga terhadap hubungan antara elite dengan negara. Perubahan yang berlangsung menjadikan elite politik tidak lagi sebagai obyek yang pasif. Setidaknya ada tiga peran penting yang harus dilakukan oleh elite politik Kabupaten Sumenep.

1. Aspek Kognitif

   Elite lokal di Kabupaten Sumenep mengetahui dan memahami berbagai persyaratan legal-formal pemekaran daerah. Mereka dapat menguraikan berbagai persyaratan tersebut, baik persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.Syarat administratif meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur serta rekomendasi menteri dalam negeri. Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Sedangkan syarat fisik kewilayahan meliputi paling sedikitnya 9 kecamatan untuk pembentukan kabupaten, tersedianya lokasi calon kota kabupaten, serta sarana dan prasarana

[12] Wawancara dengan Umar Said (10-12-2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan, karena kepulauan di anak tirikan oleh sumenep daratan, jadi solusi inilah yang menjadi keingin para tokoh elite politik yang ada di kepulauan untuk pisak dari Kabupaten Sumenep, sebagaiamana yang dikatan oleh Muhammad Sukri;

> *Sebagai solusi atas berbagai permasalahan yg tengah berlangsung di tengah-tengah masyarakat kepulauan Sumenep yang potensi wilayah, jumlah penduduk dan berbagai kebutuhan warga semakin ke sini yg harus semakin cepat, hal itu tidak mungkin kalau yg menangani Sumenep. Maka harus memisahkan diri dari Kabupaten Sumenep. Menjadi Kabupaten sendiri*

Tahap selanjutnya setelah terbentuknya DOB adalah penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan dan dokumen, serta perangkat daerah. Dalam waktu kurang lebih satu tahun kemudian diselenggarakan pemilihan kepala daerah, yang sejak 2005 telah diatur melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan demikian ada dua tahap krusial yang harus didahului sebelum DOB benar- benar bisa berdiri, yaitu: (1) tahap pengajuan usulan pemekaran wilayah sesuai dengan jenjang administratif di atas sampai dengan persetujuan DPR yang ditandai dengan pengesahan UU; dan (2) tahap pembenahan birokrasi dan pemilihan kepala daerah definitif melalui Pilkada.

Dilihat dari cara menggalang dukungan masyarakat, ada kecenderungan bahwa kelompok-kelompok elite lokal yang mengusung proses pemekaran daerah berusaha menonjolkan isu marjinalisasi untuk memperoleh dukungan luas dari warga masyarakat; dan pemekaran daerah kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disosialisasikan sebagai panasehat untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Rasa kebersamaan dan rasa senasib sepenanggungan dari warga masyarakat setempat biasanya dengan mudah dikristalisasikan untuk mendukung wacana pemekaran daerah.

2. Aspek Afektif

Pemekaran Sumenep menjadi daerah otonom yang bermartabat adalah kesepakatan kolektif masyarakat Sumenep, kesepakatan tersebut berawal dari keinginan untuk memajukan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumenep dan Sumenep pada khususnya; namun disadari bahwa keinginan tanpa perjuangan hanyalah impian serta tidak akan bermakna dan efektif tanpa adanya perjuangan yang kontinu untuk terus membangun kolektivitas dan menempuh cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Sebagaimana yang di sampaikan oleh ketua PPK2S bapak hosaini;

> *Untuk saat ini kami sudah membicarakan hal ini kepada para tokoh-tokoh kepulauan dan tentu juga kepada bapak bupati sumenep, dan kami para tokoh-tokoh kepulauan akan berusaha untuk secepetnya untuk pisah dari kabupaten sumenep*

Sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor: 129 Tahun 2000. Kemudian DPRD Kabupaten Sumenep yang berasal dari Kepulauan mengadakan *public hearing* terkait dengan pemekaran Kabupaten Kepulauan Sumenep, dan dalam kesempatan tersebut disepakati bahwa pemekaran Kabupaten Kepulauan Sumenep adalah bagian dari kepentingan masyarakat dan kepentingan Pemerintah Kabupaten Sumenep sehingga pemekaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Kepulauan Sumenep sudah menjadi kepentingan bersama. Menurut kalangan elite lokal, sejak saat itu wacana pemekaran Kabupaten Kepulauan Sumenep bergulir semakin dalam substansinya dan semakin luas cakupannya; tidak hanya terbatas di wilayah Kabupaten Sumenep tetapi ke tingkat provinsi dan nasional.

3. Aspek Evaluatif

Elite lokal di Kabupaten Sumenep menilai bahwa wacana pemekaran Kabupaten Kepulauan Sumenep yang sudah lama berkembang di masyarakat, bahkan sudah memeroleh kesepakatan luas, hingga kini masih belum jelas prospeknya. Proses studi banding, studi kelayakan wilayah, survei, dan proses politik juga sudah berlangsung; namun nasib pemekaran daerah tersebut masih terkatung-katung. Dari evaluasi tersebut tersirat bahwa masih terdapat berbagai hambatan bagi upaya realisasi wacana pemekaran daerah tersebut; baik hambatan internal maupun eksternal. Hambatan internal terkait dengan persoalan belum tuntasnya konsolidasi berbagai kelompok kepentingan (interest groups) yang beragam, meskipun memiliki tujuan yang sama. Masih ada kecenderungan kompetisi, bahkan rivalitas, di antara berbagai kelompok kepentingan tersebut. Secara internal pula masih terdapat kebelumsepakatan mengenai penetapan calon kota kabupaten baru (antara Kecamatan Arjasa, Kangayan, Sapeken, dan Masalembo, atau Gayam dll.), kelak kalau pemekaran daerah itu terwujud. Sedangkan secara eksternal, masih terdapat berbagai hambatan (teknis, administratif, dan politik) di ranah provinsi maupun pusat. Menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penilaian kalangan elite lokal, rencana pemekaran yang telah disetujui sejak 2015 lalu saat ini sesungguhnya sudah hampir memenuhi seluruh aspek yang diperlukan, termasuk daerah yang akan menjadi bagian dari Kabupaten Kepulauan Sumenep. Wilayah itu terdiri dari 9 kecamatan, meliputi Kecamatan Arjasa, Kangayan, Sapeken, Raas, Gayam, Nonggunung, Giligenteng, Masalembo, dan Talango.

Pada titik ini, elite lokal mempunyai posisi strategis terkait gerakan yang dipilihnya, tidak saja pada skala lokal, tetapi juga cara yang ditempuhnya di tingkat nasional. Mobilisasi di tingkat massa dijalankan pada masing-masing basis pendukung elite dimaksud, dan semakin meluas saat proses perjuangan dianggap memasuki fase yang menentukan terkait keberhasilan mewujudkan agenda politik pemekaran daerah. Fase menentukan ini adalah saat pemekaran daerah memasuki forum pembahasan secara kelembagaan di tingkat legislatif dan eksekutif.

Latar belakang pemekaran yang kuat dalam konteks domain publik, terutama untuk alasan peningkatan kesejahteraan rakyat setempat, masih secara fanatik dipegang oleh para elit pemrakarsa. Hal ini menyebabkan mereka sangat membantah keras saat disebut secara negatif tentang pemekaran yang hanya menjadi ajang kepentingan dikalangan elite.

Elite yang menjadi motor penggerak utama dalam pemekaran, seringkali menjadikan pemekaran sebagai arena kontestasi dan perebutan kekuasaan. Dengan adanya pemekaran, ruang kekuasaan baru akan terbuka. Salah satu contoh, jika ada wilayah mereka dimekarkan secara otomatis akan ada posisi-posisi Politik dan Birokrasi strategis (Kepala Daerah Baru, Anggota DPRD yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru sampai dengan Kepala Dinas yang baru). Untuk contoh kasus seperti ini terjadi secara umum diIndonesia secara. Hal ini mengindikasikan bahwa elitlah yang paling mungkin dan paling berkentingan dalam Pemekaran daerah.

Demikian pula elite untuk mempertahankan posisinya tidak bisa hanya dengan menyandarkan pada negara (pemerintah), tetapi harus mampu melakukan kalkulasi taktis untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, dapat pula dinyatakan bahwa di kalangan internal elite berlangsung dinamika, di mana masing-masing individu elite saling bersaing untuk mempertahankan posisi dan peranannya.

Tentunya peran positif oleh para elite sangat dibutuhkan. Para elite lokal setidaknya melakukan reaktualisasi dari visi dan misi pelaksanaan otoda bagi daerahnya, memberikan kontribusi positif bagi daerah dengan menghilangkan sikap-sikap yang hanya mementingkan kepentingan individu. Selanjutnya memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dalam berpartisipasi dalam bidang tersebut sehingga tak ada lagi konflik-konflik horisontal yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya para elite lokal harus bersikap bijak dalam mengambil segala keputusan yang berkaitan dengan pengembangan daerah. Hal yang penting lainnya ialah kemauan untuk membangun daerah karena hal inilah kunci dari berhasil tidaknya otonomi daerah itu dilaksanakan. Jika kemauan dari para elite lokal baik, maka niscaya daerah akan semakin mudah dalam meraih kesejahtaraan di segala aspek kehidupannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Langkah-langkah yang Dilakukan Untuk Mewujudkan Kabupaten Kepualauan Sumenep

Dalam rangka mempermudah untuk mewujudkan cita-cita Pemekaran Kabupaten Kepulauan Sumenep, minimal ada tiga lembaga pemerintahan yang harus dilalui dan dikawal betul jika ingin mewujudkan pemekaran daerah sebagaimana yang tertuang dalam PP RI No.78/2007, di antaranya yaitu:

1. Persetujuan DPRD Kabupaten dan persetujuan Bupati Sumenep

   Sebagaian besar dari masyarakat kepulauan tentu sudah mengetahui bahwa pemerintah Sumenep tidak menginginkan melepas Kabupaten kepulauan, dengan pertimbangan belum adanya alternatif APBD untuk Kabupaten Sumenep bagian daratan, mengingat APBD terbesar Kabupaten Sumenep diperoleh dari kepulauan, seperti migas dan hasil laut. Dalam hal ini pemerintah Sumenep terkesan tidak demokratis dan egois, pemerintah tidak lagi memikirkan kesejahteraan secara merata, tidak adanya ketimpangan antara masyarakat daratan dengan kepulauan dan setiap warga Negara berhak mengeksplor potensi dirinya. Kesetaraan dan egalitarian yang dicanangkan padaera reformasi tidak tampak pada pola kepemimpinan pemerintah Sumenep, karena sempitnya pemikirkan pemerintah sehingga hanya melihat APBD terbesar hanya mengkin didapatkan dari kepulauan padahal masih banyak alternatif untuk memenuhi APBD seperti kekayaan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep yang di daratan, tetapi lagi-lagi karena sempitnya melihat APBD, yang hanya bergantung pada migas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang disamapaikan Anwari salah satu panitia yang juga founder Media Kangean.net

> *Ketika mengaca pada Negara maju, pendapatan mereka tidak bergantung pada alam melainkan pada kebudayaan dan seni yang dimilikinya. Lihat saja kota-kata di Singapura, Prancis, dan Italia.Kalau di dalam negeri, Bandung, Surakarta, Kutai Kartanegara Kaltim, Rakon Hilir dan lain-lain.Mereka memperoleh APBD bukan mengeksploitasi Sumber Daya Alamnya melainkan mengeksplor potensi manusianya.*[13]

Anwari lebih lanjut menyampaikan bahwa untuk mempermuda tercapainya tujuan Kabupaten Kepulauan, maka harus melobi DPRD yang merupakan wakil dari Kepulauan.

> *Kita membutuhkan orang dalam, supaya cita-cita kita lebih muda tercapai. Artitinya gerakan kita bukan hanya sebatas terhenti sebagai wacana kosong. Oleh karena itu, kita perlu melobi Anggota DPRD mewakili Kepulauan.*

Lebih lanjut Anwari mengatakan, bahwa usaha untuk pemekaran ini bukan hanya wacana, tapi benar-benar niat dari masyarakat kepulauan dan para tokoh elite kepulauan;

> *Hingga saat ini komunikasi antar panitia masih terjalin, ini bukan hanya wacana sebab sejak adanya niat pengkabupatenan ini para tokoh-tokoh agama dan para elite kepulauan sudah bersepakat untuk komitmen memperjuankan sampai behasil.*

2. Persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur Jawa Timur

Prasyarat ini sangat mungkin dipenuhi, karena Jawa Timur adalah provinsi yang paling luas di pulau Jawa, dan sering kali terjadi ketimpangan karena jangkaunnya yang sulit. Apalagi baru-baru ini ditambah dengan isu P4M, tetapi sayangnya lagi-lagi belum adanya aktor yang mengawal secara serius, sehingga panitia kebingungan mencari pintu masuk dalam menyampaikan

[13] Wawancara dengan Anwari (22-11-2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspirasi pemekaran daerah ke level provinsi. Akses kesana memang sulit sebagaimana disampaiakan oleh Anwari

> *Kita menyadari bahwa akses kesana memang sulit. Tapi saya yakin pasti ada jalan. Kita punya tokoh masyarat yang pernah mencalonkan wakil gubernu Jatim. La harapannya, beliaulah yang menjembatani kita. Karena beliau memiliki akses yang cukup luas di tingkat daerah. Dengan adanya beliau, maka besar harapan saya, Kabupaten Kepulauan akan segera terwujud.*[14]

Dan bahkan wacana pengkabupaten ini mulai di bicarakan kepada para ahli dalam pemekaran, dan mereka mengatakan wacana ide pengkabupatenan ini seharusnya cepet di laksanakan supaya tidak mengomong doing, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad sukri;

> *Mingu-minggu terakhir ini, PPKKS mencoba berkomunikasi dg beberapa para ahli yg sudah berpengalaman dlm pemekran daerah baru, namun komunikasi kami tidak selalu intim bertemu karena yg bersangkutan sering berada di Norwegia. Selain itu, komunikasi antar anggota PPKKS juga sering dilakukan untuk menghambat miskomunikasi diantara kami. Saat ini kami juga sedang menyusun rencana akan diadakannya seminar tentang Pengkabupatenan, dengan tujuan memberikan informasi secara persuasif kepd masyarakat yg dituju, supaya mereka sadar bahwa kami, mereka dan semua masyarakat kepulauan sadar akan kebutuhan pengkabupatenan ini. Dan banyak lagi tokoh2 yg kita ajak bertemu untuk membicarakan pengkabupatenan ini.*

3. Rekomendasi Menteri Dalam Negeri

Untuk rekomendasi, dapat digolongkan sebagai langkah yang mudah asalakan ada yang mengawal dan selesai di internal daerah otonom. Mengingat misi dari penerapan otonomi daerah adalah setiap daerah didorong agar mampu bersaing dengan daerah lain guna mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat daerah. Sehingga ketimpangan bagi

[14] Wawancara dengan Anwari (22-11-2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Indonesia tidak lagimenjadi masalah yang mendasar. Jadi ketika semakin banyak daerah yang mekar dan mandiri harapan pemerintah pusat rakyat sudah bisa menggali potensi daerahnya dan dapat bersaing dengan masyarakat di muka bumi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id